

Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme

Nurus Shalihin,¹ Firdaus²

¹Fakultas Ushuluddin & Studi Agama,
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam
Bonjol, Padang - Indonesia
email: nurus_djamra@yahoo.com;

²Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP
PGRI Sumatera Barat, Padang - Indonesia
email: firdaus@stkip-pgri-sumbar.ac.id

Abstract: Indonesia has long been aware of the importance of gender equality through accommodating women's public rights and recognizing the importance of women's position in development. However, the efforts have not been fully able to create equal and fairness relations between men and women. This conceptual paper is the purpose to explore the main issues in order to develop gender equality relations in Indonesia. Through the study of existing literature, the authors find two main issues on gender equality development in Indonesia. First, the problem of human resources development policy that not yet based on empowerment oriented. Second, the penetration capitalism on placed the women in not favorable position. In order to solve the two main problems, authors offer a gender transformation as strategies to raise gender equality.

Keywords: gender transformation; developmentalism; capitalism

Abstrak: Indonesia sudah sejak lama menyadari arti penting kesetaraan gender dengan mengakomodir hak-hak publik perempuan dan memberikan pengakuan atas pentingnya posisi perempuan dalam pembangunan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan relasi yang setara dan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan. Paper konseptual ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah utama dalam membangun relasi kesetaraan gender di Indonesia. Melalui penelusuran literature yang tersedia, penulis menemukan dua masalah utama dalam pembangunan kesetaraan gender di Indonesia. Pertama, masalah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum berorientasi pemberdayaan. Kedua, penetrasi kapitalisme dalam menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Untuk mengatasi kedua masalah utama tersebut, penulis mendiskusikan pendekatan transformasi gender sebagai strategi dalam membangun kesetaraan gender.

Kata Kunci: transformasi gender; pembangunanisme; kapitalisme

A. Pendahuluan

Wacana tentang gender mendapat perhatian yang serius di Indonesia sejak satu dekade terakhir.¹ Hal ini bermuara dari gerakan global dalam menyikapi keterpurukan nasib kaum perempuan.² Munculnya gerakan feminisme yang mempertanyakan keabsahan legitimasi struktural dan kultural terhadap posisi dan peran domestik-publik, dapat diidentifikasi sebagai cerminan kepedulian terhadap nasib kaum perempuan.³ Alasan mengapa ranah domestik dan publik yang dipersoalkan, adalah karena tersubordinasi dan termarginalisasinya perempuan yang disinyalir berawal dari adanya pembagian kerja secara seksual.⁴ Upaya ke arah *gender equality* paling tidak telah dimulai di Indonesia sejak tahun 1983. Hal ini dapat ditelusuri dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia secara sadar mengakui betapa pentingnya peran perempuan dalam setiap proses pembangunan. Pada tataran operasional, berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seperti terlihat dalam pemerintahan Orde Baru dengan dibentuknya suatu departemen khusus yang mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan kualitas perempuan. Dibentuknya organisasi perempuan seperti Dharma Wanita, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan lain-lain, merupakan salah satu wujud dari rasa kepedulian terhadap nasib kaum perempuan, dan sekaligus salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki mereka.

Salah satu upaya ke arah *equity* adalah membebaskan kaum perempuan dari sektor domestik ke sektor publik. Upaya ini mengalami kemajuan yang

¹Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesenjangan Gender: Pemikiran Islam kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam," *Jurnal Al-ulum* 13, no. 2 (2013): 491-512.

²Saskia E Wieringa, "Gender Harmony and the Happy Family: Islam, Gender and Sexuality in post-Reformasi Indonesia," *South East Asia Research* 23, no. 1 (2015): 27-44, <https://doi.org/10.5367/sear.2015.0244>.

³Sri Hidayati Djoeffan, "Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17, no. 3 (2001): 284-300, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v17i3.49>.

⁴Kitae Sohn, "Gender Discrimination in Earnings in Indonesia: A Fuller Picture," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51, no. 1 (2015): 95-121, <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016569>.

cukup pesat, seperti yang dapat disaksikan, banyak kaum perempuan telah berkibrah di sektor publik yang pada awalnya dianggap wilayah laki-laki, mulai dari ekonomi,⁵ sosial,⁶ industri⁷ dan politik.⁸ Studi Kitae Sohn (2015) bahkan menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan (13,0%) lebih tinggi dibanding pendapatan laki-laki (7,5%).⁹ Namun demikian, fenomena ini tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai indikator untuk mengklaim bahwa perempuan telah sepenuhnya terbebas dari eksploitasi. Terdapat beberapa persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan kapitalisme global. Dalam hal ini, penting digarisbawahi bahwa keterlibatan perempuan dalam perekonomian ternyata belum seutuhnya mampu menyelesaikan masalah yang selama ini menimpa mereka, yaitu eksploitasi dan diskriminasi.

Perempuan yang telah memutuskan bekerja di luar rumah, kerap mendapatkan perlakuan yang eksploitatif dan diskriminatif di tempat kerja. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh persoalan marginalisasi dalam pekerjaan, kedudukan perempuan yang subordinat dalam struktur sosial dan budaya, stereotype terhadap perempuan, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah.¹⁰ Eksploitasi *sales promotion girl*¹¹ dan ketimpangan akses dan pelayanan terhadap perempuan¹² miskin menunjukkan bahwa ketidakadilan gender

⁵Sri Rahmadani, "Bersiasat dengan Sumber Pendapatan; Analisis Struktur-Agensi Sumber Pendapatan Ganda Petani Miskin Sawah Nagari Batipuah Baruah, Kab. Tanah Datar," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 6, no. 1 (2017): 11–22, <https://doi.org/10.22202/mamangan.1170>.

⁶Ira Ariesta, "Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 2 (2014): 41–51, <https://doi.org/10.22202/mamangan.97>.

⁷Anggaunitakiranantika Anggaunitakiranantika, "Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 45–66, <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216>.

⁸Leviane Jackelin Hera Lotulung dan Dedy Mulyana, "Perempuan dan Politik di Sulawesi Utara," *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 20, no. 2 (2018): 138–44; Jendrius, "Ayam Batino Lah Bakukuak: Otonomi Daerah dan Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat," *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 1, no. 2 (2011): 121–36, <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.73>.

⁹Kitae Sohn, "The Height Premium in Indonesia," *Economics and Human Biology* 16 (2015): 1–15, <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2013.12.011>.

¹⁰Khusnul Khotimah, "Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan," *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 4, no. 1 (2009): 158–80.

¹¹Nur Afta Lestari, "Eksploitasi pada Perempuan Sales Promotion Girls," *Komunitas: International Journal of Indonesian and Culture* 4, no. 2 (2012): 139–47, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2402>.

¹²Rahmitha Rahmitha et al., "Poor Women 's Livelihoods and Access to Public Services" (Jakarta: Smeru Research Institute, 2016).

masih dihadapi perempuan Indonesia. Ketidakadilan tersebut mulai dari marginalisasi dari proses pembangunan, tersubordinasi dari dominasi sebuah sistem yang cenderung patriarkhi, mengalami ketidak-adilan, tindakan kesewenang-wenangan, hingga menjadi objek eksploitasi.

Tulisan ini membahas sejauhmana kebijakan pengembangan sumber daya manusia telah mengangkat harkat dan martabat perempuan, sekaligus melihat bagaimana kehadiran kapitalisme global telah ikut melanggengkan posisi subordinasi perempuan. Setelah itu, tulisan akan diakhiri dengan pembahasan transformasi gender dan pemberdayaan perempuan sebagai strategi yang dapat digunakan untuk pembebasan perempuan dari penindasan.

B. Pengembangan SDM: Dilema Pemberdayaan Perempuan

Runtuhnya sendi-sendi perekonomian rezim Orde Baru semakin menyadarkan banyak kalangan bahwa kebijakan pembangunan yang bertumpu pada logika *production centered development*, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya fokus perhatian, dan melihat modal serta efisiensi ekonomi sebagai determinan pertumbuhan utama,¹³ tidak mampu seutuhnya menjawab problem kemanusiaan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dalam perspektif *human centered development* yang menjadikan manusia sebagai fokus utama dan aktualisasi potensi¹⁴ sebagai nilai yang harus diwujudkan, semakin kokoh dan diilai valid dalam proses pembangunan.

Pergeseran paradigma pembangunan dari *production centered development* ke *people centred development* hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, terutama pemberdayaan perempuan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, kontribusi perempuan cukup besar dalam pembangunan ekonomi, namun besarnya peranan perempuan hanya menjadi objek untuk melayani kepentingan ekonomi politik semata. *Kedua*, perempuan memberikan 66% jam kerjanya, akan tetapi hanya menikmati 10%

¹³Yunita T. Winarto, "State Intervention and Farmer Creativity: Integrated Pest Management among Rice Farmers in Subang, West Java," *Agricultural and Human Values* 12, no. 4 (1995): 47-57, <https://doi.org/10.1007/BF02218566>; R. William Liddle, "The Relative Autonomy of the Third World Politician: Soeharto and Indonesian Economic Development in Comparative Perspective," *International Studies Quarterly* 35, no. 4 (1991): 403-27, <https://doi.org/10.2307/2600948>.

¹⁴Marina Welker, "The Green Revolution's ghost: Unruly subjects of participatory development in rural Indonesia," *American Ethnologist* 39, no. 2 (2012): 389-406, <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2012.01371.x>.

dari upahnya. Perempuan bertanggungjawab terhadap 30% produksi pangan sedunia, namun hanya menguasai 1% dari *material goods* yang ada. Ketiga, perempuan lebih sedikit menikmati hasil kontribusinya terhadap produksi nasional. Rata-rata upah per-jamnya lebih rendah dari laki-laki, sementara perlindungan hukum bagi mereka lebih kurang dari laki-laki, dan ruang gerak kerja perempuan sangat terbatas seperti buruh kasar dengan bayaran rendah. Akses perempuan terhadap sumber produksi juga lebih kecil jika dibanding dengan laki-laki.¹⁵

Meskipun pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengembangan sumber daya perempuan mendapat perhatian serius sejak tahun 1983 (lihat misalnya GBHN dan TAP MPR II/1983), namun secara umum kebijakan yang ada masih belum dapat sepenuhnya memperbaiki keterpurukan nasib perempuan. Hal ini karena terdapat beberapa persoalan yang belum tersentuh secara substantif. Di antara masalahnya adalah tentang kebijakan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, dimana pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) pada tataran praksis, bukanlah perkara mudah, karena pemahaman terhadapnya mengalami *ambiguous* dan *misleading*.¹⁶ Hal ini dapat ditelusuri dari adanya pemahaman bahwa manusia kerap kali ditempatkan sebagai *resources* pembangunan, dimana nilai dan harga manusia sangat ditentukan oleh sejauhmana kontribusinya relevan terhadap proses produksi. Manusia hanya dilihat sebagai mesin produksi, sehingga parameter kualitas manusia diukur melalui sejauhmana mereka sanggup beradaptasi dengan tuntutan perkembangan dunia industri.

Dalam konteks ini sebenarnya keberadaan perempuan semakin tidak mendapat tempat dalam proses pembangunan, karena pada hakikatnya industrialisasi tidak menguntungkan perempuan. Ini disebabkan oleh produksi industri didasarkan pada unit besar yang sarat modal. Ini berarti akan mengurangi pekerjaan perempuan, dimana tenaga kerja yang dibutuhkan adalah yang terampil dan profesional.¹⁷ Hal lain misalnya, dengan keterbatasan yang dimiliki perempuan sebagai individu (*human capital*) dalam hal pendidikan,

¹⁵Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 60.

¹⁶Tjokrowinoto.

¹⁷Rahmitha et al., "Poor Women's Livelihoods and Access to Public Services."

pengalaman dan keterampilan kerja, kesempatan kerja dan faktor ideologis, menyebabkan perempuan memasuki dunia kerja berupah rendah sehingga kemungkinan besar perempuan dieksploitasi. Keadaan ini sesungguhnya merupakan gejala diskriminasi dan eksploitasi, dimana perempuan tersegmentasi pada sektor sekunder atau sektor informal yang berupah rendah, peluang terbatas, kesempatan promosi kecil, dan jaminan sosial tidak tersedia.¹⁸

Kondisi ini merupakan fakta yang harus dihadapi oleh perempuan, dimana mereka kurang mempunyai akses dalam proses pembangunan karena tidak memiliki *bargaining position*. Hal ini, disinyalir sebagai implikasi pembagian kerja secara seksual yang memunculkan stereotipe bahwa dunia industri adalah domainnya laki-laki.¹⁹ Akibat distorsi makna tersebut, dunia industri kemudian dikonstruksi dengan sesuatu yang identik dengan karakter laki-laki. Di sisi lain, perempuan yang di-*image*-kan lemah gemulai, lembut, penyayang, ibu anak-anak, dan sebagainya, tidak cocok dengan dunia tersebut dan mereka seharusnya tetap berada di ranah domestik.

Ironisnya lagi, secara terpaksa kaum perempuan harus ikut bekerja untuk mensubsidi kebutuhan rumah tangga dan menopang kehidupan karena keterdesakan suami dalam menafkahi keluarga. Mereka bekerja apa saja, sebagai petani, pedagang kecil dan sebagainya yang karena keterdesakannya, pekerjaan yang sering mereka geluti adalah pekerjaan kasar, rendah, dan kurang menguntungkan bila dibanding dengan laki-laki. Sebaliknya, perlindungan terhadap mereka kurang mendapat perhatian secara optimal. Studi Lestari misalnya, menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja sebagai sales rokok dan minuman kerap mengalami eksploitasi fisik, baik berupa pelecehan verbal maupun pelecehan fisik dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu mereka juga mengalami eksploitasi ekonomi dengan jam kerja yang terlalu lama. Tidak hanya sampai di situ, hak-hak mereka sebagai pekerja perempuan, seperti keselamatan kerja dan cuti, juga tidak terpenuhi.²⁰

Hal lain yang lebih memprihatinkan adalah ketika perempuan secara terpaksa harus “melacur” untuk mencari nafkah demi mempertahankan

¹⁸Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 222.

¹⁹Anette Fagertun, “Labour in Paradise: Gender, Class and Social Mobility in the Informal Tourism Economy of Urban Bali, Indonesia,” *The Journal of Development Studies* 53, no. 3 (2017): 331–45, <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1184248>.

²⁰Lestari, “Eksploitasi pada Perempuan Sales Promotion Girls.”

hidup.²¹ Anak-anak juga ikut dijemur dan bahkan dipaksa ke dalam dunia pelacuran²² yang merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sikap negara dan masyarakat acap kali bersifat ganda dalam melihat pekerja seksual. Di satu pihak mereka dilarang, dihina, dan dianggap sampah masyarakat, namun di pihak lain tempat mereka selalu ramai dikunjungi. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri sebagai suatu industri dimana banyak orang bergantung secara ekonomi terhadap eksistensi mereka.

Dalam kasus lain, secara struktur perempuan dirugikan oleh kebijakan pemerintah mengirim tenaga kerja perempuan ke luar negeri dan mengeruk keuntungan dengan meningkatnya devisa negara, namun perlindungan dan pembekalan terhadap mereka kurang mendapat perhatian yang cukup. Lebih dari 70% tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan, dan mayoritas bekerja di sektor domestik dimana UU Ketenagakerjaan dan UU Hubungan Industrial di negara tujuan tidak dapat menjangkau dan melindungi mereka.²³ Implikasinya, mereka rentan terhadap pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan dan bentuk kekerasan lainnya yang merendahkan martabat mereka sebagai perempuan. Pemerintah bahkan kerap menghindari dan menimpakan semua kesalahan terhadap perempuan itu sendiri. Kasus Adelina Lisao (21 tahun), TKI asal Nusa Tenggara Timur yang saat ditemukan di depan rumah majikannya di Penang, Malaysia dalam keadaan penuh luka di sekujur tubuhnya, dan kasus kekerasan yang dialami TKI lainnya di Malaysia²⁴ adalah kasus dimana perempuan sangat rentan di sektor domestik.

²¹Miwa Patnani, "Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan," *Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi* 3, no. 2 (1999): 57–60, <https://doi.org/10.23917/indigenous.v0i0.4603>; Aad Satria Permadi, "Menjadi Pelacur: Studi Fenomenologis tentang Proses Terbentuknya Motif Melacur pada Warga Desa X," dalam *Seminar Nasional "Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"* (Surakarta, 2015), 1–8.

²²Yanuar Farida Wismayanti, "Perempuan dalam Jaringan Perdagangan Anak yang Dilacurkan di Kota Surabaya," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 17, no. 02 (2012): 117–33, <https://doi.org/10.33007/ska.v17i2.819>; Yanuar Farida Wismayanti, "Perdagangan Anak Perempuan yang Dilacurkan: Potret Suram Kemiskinan dan Perlindungan Anak," in *Child Poverty and Social Protection Conference* (Jakarta: Smeru Research Institute, 2013), 1–23; Bagong Suyanto, "Nak Perempuan Yang Dilacurkan: Alasan Menjadi Pelacur dan Mekanisme Adaptasi," *Makara Hubs-Asia* 18, no. 1 (2014): 66–76, <https://doi.org/10.7454/mssh.v18i1.3462>.

²³Elisabeth Dewi, "Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 9, no. 1 (2013): 1–6.

²⁴Ardi Priyatno, "Penyiksaan TKI di Malaysia, Kisah Suram yang Seolah Tiada Akhir," ed. Ervan Hardoko, *internasional.kompas.com*, 13 Februari 2018.

Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia yang menempatkan manusia sebagai *reources* pembangunan dapat dinilai merugikan perempuan karena pengembangan sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan *human centered development*. Obsesi pendekatan ini tidak hanya terkonsentrasi pada membentuk manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan sistem produksi, akan tetapi lebih menfokuskan perhatian pada upaya bagaimana mengembangkan kemampuan manusia dalam mengaktualisasikan dirinya dengan segala potensi yang ada. Pemahaman ini berarti menjadikan manusia tidak hanya sebagai objek pembangunan, akan tetapi manusia lebih dilihat sebagai subjek determinasi, corak dan arah suatu pembangunan.

Secara teoritik, paling tidak ada dua hal yang turut mempengaruhi ketidakadilan gender dalam proses pengembangan kualitas sumber daya manusia, yaitu pertama, ideologi *developmentalism* dan kedua WID (*Womens in Development*). Paradigma *developmentalism* yang dijanjikan sebagai ideologi yang mampu membedah dan menyembuhkan penyakit kemiskinan dan keterbelakangan umat manusia, tidak mampu menyelesaikan masalah. Sebaliknya, *developmentalism* menciptakan masalah baru yang jauh lebih rumit dari sebelumnya, yaitu munculnya berbagai proses modernisasi di hampir seluruh aspek kehidupan. Hal ini dilatari oleh *developmentalism* sebagai sebuah rekayasa Barat untuk dunia ketiga. Ideologi ini diboncengi oleh kepentingan kapitalisme yang sangat erat kaitannya dengan perempuan, dan tragisnya, sangat tidak berpihak pada kaum perempuan.

Salah satu implikasi ideology *developmentalism* adalah terciabik-cabiknya wajah kaum para petani di desa-desa melalui *revolusi hijau*. Sebelum masuknya teknologi ke areal pertanian, masyarakat tradisional yang bersifat subsistem, baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama bekerja. Bahkan perempuan cukup mendominasi sektor pertanian terutama di musim panen.²⁵ Dengan kata lain, perempuan mempunyai peluang dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi dirinya di tengah-tengah masyarakat. Mereka sadar harus melakukan sesuatu sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban, sekaligus bertanggung jawab dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya. Akan tetapi setelah masuknya kapitalisme

²⁵Sediono MP. Tjondronegoro, "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa," *Majalah Prisma* 2, 1990, 3-14.

melalui teknologi pertanian, sektor pertanian yang semula domain perempuan dalam kehidupinya, dirampas dan tersingkirkan. Hal ini tidak lain karena konsep *developmentalism* sesungguhnya lebih berpihak kepada kaum laki-laki. Perempuan yang telah dikonstruksi dengan *image* sebagai entitas yang tidak memiliki keterampilan dalam mempergunakan teknologi, tersingkir dalam hiruk pikuknya proses pembangunan. Dengan demikian sebenarnya *developmentalism* merupakan suatu sistem yang memiliki watak otoriter dan eksploitatif di bidang ekonomi, bersifat represif di bidang politik dan berwatak dominatif secara kultural.²⁶

Kegagalan *developmentalism* dan modernisasi dalam menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan telah menyisakan tumpukan berbagai penyakit. Diantaranya adalah semakin termarginalnya posisi perempuan. Pada tahun 1970 muncullah konsep baru yang bernama WID (*Womens in Development*). Konsep ini mengupayakan bagaimana perempuan tidak termarginalkan dalam proses pembangunan. Agenda utama WID adalah upaya melibatkan perempuan dalam aktivitas pembangunan. WID berasumsi bahwa biang kemiskinan dan keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam merealisasikan proyek WID, Indonesia mencanangkan berbagai program melalui pembentukan organisasi seperti Dharma Wanita, PKK dan lain sebagainya. Kedua organisasi ini (Dharma Wanita dan PKK) diandaikan lebih memungkinkan perempuan bergerak secara leluasa karena diberi porsi oleh pemerintah untuk menggalang partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dan melalui kedua organisasi ini diharapkan harkat dan martabat kaum perempuan dapat terangkat.

Faktanya, program-program yang dicanangkan Dharma Wanita dan PKK tidak lepas dari intervensi dan kepentingan negara yang bias patriarkhat. Meskipun diberikan ruang gerak yang luas pada perempuan dalam mengaktualisasikan diri mereka, namun secara struktural kedua organisasi tersebut tidak lebih dari perpanjangan tangan negara dalam meralisasikan kepentingan-kepentingan kekuasaan yang cenderung *status quo*. Pandangan ini didasarkan atas beberapa hal. *Pertama*, Dharma Wanita merupakan organisasi para istri pegawai negeri, dimana seorang pejabat sangat memungkinkan melakukan

²⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

mobilisasi dan menggerakkan kaum perempuan melalui istrinya. Hal ini berarti, hegemoni istri pimpinan akan dengan mudah menggerakkan anggotanya untuk turut menyukseskan keputusan suaminya. Dharma Wanita secara tidak langsung, telah mensistematisasikan fungsi istri sebagai pendukung dan alat untuk menjustifikasi kepentingan suami. Dengan skema ini, sulit mengharapkan kemandirian dalam wadah ini dalam proses perencanaan program yang benar-benar bersifat pemberdayaan bagi perempuan. Bahkan program yang disusun cenderung berorientasi ke arah nilai-nilai patriarki negara, dan seringkali mengabaikan kepentingan perempuan.

Kedua, meskipun dasar pembentukan PKK cukup berbeda *dengan* Dharma Wanita, tetapi dalam prakteknya keduanya sangat komplementer dan berfungsi saling menguatkan. Misalnya, pelaksanaan program terpadu P2W-KSS (Peningkatan Peranan Wanita-Keluarga Sehat Sejahtera). Pada tingkat perencanaan, desainer pelatihan adalah wewenang Camat, Tim Pembinaan LKM, Tim Penggerak PKK, Pengurus PKK, LKMD dan Keluarga Binaan P2W-KSS. Program-program yang telah disusun diserahkan operasionalnya pada penggerak PKK yang terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, wiraswasta, (sementara diketahui pimpinan PKK adalah istri lurah/desa yang dikordinir oleh istri camat yang sekaligus anggota Dharma Wanita). Dari sini amat jelas bahwa gejala kemunculan Dharma Wanita dan PKK tidak lebih sebagai praktek korporatisme negara pada perempuan.

Jadi pengembangan sumber daya perempuan melalui pemberdayaan yang berorientasi terhadap pengembangan peran dan martabat perempuan yang diupayakan oleh kedua organisasi tersebut, sebenarnya berakar pada model WID yang berasumsi bahwa ketidakberdayaan dan keterbelakangan perempuan disebabkan kurangnya pendidikan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kaum perempuanlah yang harus diberdayakan dan digenjut untuk diaktifkan, bukannya kebijakan pembangunan yang harus diubah menurut kebutuhan perempuan. Asumsi dan pemikiran WID berimplikasi terhadap kecenderungan praktek pengintegrasian perempuan dalam keseluruhan obsesi pembangunan yang pragmatis, modernis dan berorientasi pada pertumbuhan.

Penekanan pada aspek *equity* cenderung kurang mendapat perhatian karena pendekatan model WID, secara substansial memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, perspektif WID tidak memandang dan memosisikan perempuan sebagai subjek, melainkan sebagai objek pembangunan. Konse-

kuensinya, program-program pemberdayaan perempuan dipandang sebagai bagian integral dari program pembangunan. Kebijakan dan program-program dibentuk dan dirumuskan secara *top down* dan bias kepetingan sistem yang sedang berkuasa. Akhirnya kebutuhan perempuan diterjemahkan hanya sebatas pertimbangan pembangunan yang masih berakar pada nilai-nilai ketimpangan gender, seperti adanya tuntutan partisipasi aktif perempuan melalui peran domestik semata. Pendekatan seperti ini tidak memungkinkan adanya proses pemberdayaan yang substantif terhadap posisi marginal perempuan dalam pembangunan karena posisi perempuan tidak diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kedua, dampak modernisasi yang mengorientasikan manusia pada nilai-nilai hidup moderen. Kesejahteraan suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan sejauhmana usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi ketimpangan antara si kaya dengan si miskin, mengantisipasi monopoli ekonomi di tangan segelintir orang, mengatasi ketidakadilan gender dan lain-lain, bukan dengan memodernisasi masyarakat. Kebijakan pemerintah Orde Baru tentang keluarga berencana untuk mengatasi peningkatan angka kelahiran, misalnya, menjadikan perempuan sebagai korban dalam kontrol terhadap kelahiran. Dengan demikian kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan perempuan sebenarnya belum ada, sebab program-program yang dijalankan selama ini berakar pada kebijakan yang berdimensi kependudukan dengan menggarisbawahi partisipasi perempuan dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera untuk kesuksesan pembangunan nasional.

C. Kapitalisme: Gaya Baru Penindasan Perempuan

Kehadiran globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah membawa perubahan-perubahan yang cukup besar dan nyata dalam kehidupan manusia. Perubahan itu terlihat jelas dalam masyarakat ketika kapitalisme melakukan ekspansi pasar secara luas pada negara-negara berkembang untuk memasarkan produk-produknya. Dalam globalisasi ekonomi, kekuatan pasar diyakini mampu membawa ke arah kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam perspektif ini ekspansi pasar dan perkembangan perdagangan bebas tidak dapat dilihat hanya sebagai lalu lintas ekonomi, tapi juga sebagai masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Pasar dalam globalisasi ekonomi telah mengambil peran yang cukup penting dalam kehidupan, terutama bagi kepentingan kapitalisme dalam

memasarkan produk-produknya. Kenyataannya pasar telah menjadi sosok determinan dalam menguasai hampir seluruh lini kehidupan, dimana pasar memiliki kemampuan menjadikan apa saja sebagai objek komoditas.

Kapitalisme melalui media promosi seperti iklan, baik di media cetak maupun elektronik mentransformasikan nilai-nilai *consumer culture*. Transformasi ini ditujukan untuk agenda perubahan sosial, karena dengan tanpa perubahan sosial kapitalisme akan mengalami kendala yang cukup besar untuk menggaet pangsa pasar dalam memasarkan produk-produknya pada masyarakat. Keniscayaan perubahan sosial untuk ekspansi pasar sebagai bagian dari proses globalisasi karena dengan adanya perubahan sistem nilai dan terbentuknya budaya konsumsi, masyarakat akan mudah mengkonsumsi produk-produk industri.²⁷

Transformasi *consumer culture*, melalui promosi dan iklan (terutama) TV dan majalah, menjelma menjadi mesin giling kapitalisme dan arus konsumerisme. Kapitalisme merekayasa dan mempromosikan *life style* modern yang dikemas apik dalam berbagai simbol kebahagiaan atas konsumsi itu. Melalui iklan, keinginan-keinginan dikonstruksi, penampilan dan gaya seolah-olah sesuatu yang sangat penting,²⁸ dan di bagian lain persoalan moralitas disingkirkan. Karena iklan, gaya hidup pun menjadi suatu keniscayaan dan segala-galanya, dan segala-galanya adalah gaya hidup.²⁹ Gaya hidup menjadi komoditas, dan komoditas sepenuhnya dipermak untuk mengkonstruksi gaya hidup.

Melalui media promosi, konsumen dirasuki dan digiring untuk mengikuti keinginan terhadap produk tertentu, sehingga konsumen merasa tergantung seolah-olah kehidupannya tidak lengkap dengan tanpa mengonsumsi produk yang diiklankan. Dunia iklan bagi kapitalisme adalah alat paling efektif untuk mengontrol ideologi pasar dan menciptakan ketergantungan konsumen pada produk yang ditawarkan.³⁰ Citra diri seseorang diukur dari apa yang mampu

²⁷H Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

²⁸Firdaus Firdaus, "Parade Iklan Politik di Tahun Politik: Polarisasi Penggunaan Iklan Politik Untuk Membangun Citra Menuju Pemilu 2014," *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 1 (2013): 81-94, <https://doi.org/10.15548/turastv1i1.475>.

²⁹Idi Subandy Ibrahim, *Acstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia* (Bandung: Mizan, 1997).

³⁰Richard Bernet dan Jand Rond Muller, *Global Reach, The Power Multinational Corporation* (New York: Simon and Scuster Rockefeller Center, 1974).

dibelinya, bukan dari apa yang dimiliki sesuai kebutuhan. Iklan bagaikan seorang teman yang mewartakan tentang hal yang indah, meski orang yang jadi sasaran iklan tidak tahu pasti apakah hal itu eksis atau tidak. Keberhasilan kapitalisme membentuk gaya hidup melalui iklan dapat dilihat dari hampir 70 persen wanita Indonesia memiliki obsesi yang tinggi untuk memiliki kulit putih sebagai citra cantik yang dicitrakan oleh iklan.³¹

Hampir semua media telah menjadi alat yang cukup signifikan bagi kapitalisme dalam mentransformasikan gaya hidup yang mementingkan komestika, kontes kecantikan, salon indah, mobil mewah, dan sebagainya. Oleh karena keberhasilan kapitalisme sangat tergantung kepada media masa, maka media masa pun tumbuh subur menjadi industri yang bukan saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, akan tetapi media masa harus mengikuti standar dan logika yang hidup dalam industri kapitalisme. Ia tidak saja memoles produk budaya, tapi dengan produk budaya dikonstruksi selera, cita rasa, dan alam kesadaran.³² Tidak hanya itu, media sendiri juga ikut terseret ke dalam mekanisme pasar yang tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma, namun telah menjadi komoditi bagi kapitalisme.

Dalam sistem ekonomi pasar, kapitalisme merambah apa dan siapa saja untuk dijadikan komoditi karena kebebasan transaksi. Kebebasan transaksi tidak hanya terjadi antara barang-barang atau produk-produk antar satu negara ke negara lain, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain, tetapi juga merambah energi-energi libido. Selain itu, ekonomi bukan hanya berhubungan dengan aktivitas pendistribusian hasil produksi dalam lalu lintas pertukaran ekonomi, namun produksi, distribusi, pertukaran, transaksi dan konsumsi apapun seperti, pengetahuan, pendidikan, moralitas, etika, tubuh, wajah, kegairahan dan ekstasi.³³ Dalam sistem ini, perempuan kerap menjadi komoditi. Supermarket, mall, plaza yang menjadikan perempuan sebagai alat penggaet konsumen adalah bentuk nyata dimana perempuan dijadikan komoditi. Baik di perkotaan, maupun di pedesaan, pelayan toko dan pedagang lebih banyak perempuan

³¹Hannah Aidinal al-Rashid, *Putih Cantik-Persepsi Kecantikan dan Obsesi Orang Indonesia untuk Memiliki Kulit Putih* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010).

³²Ibrahim, *Acstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*.

³³Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milinium Ketiga dan Matinya Posmodernisme* (Bandung: Mizan, 1998).

dibanding laki-laki. Pertanyaan adalah mengapa harus perempuan? Ada beberapa alasan mengapa kapitalisme memilih perempuan menjadi pangsa pasarnya, *pertama* persentase perempuan lebih tinggi sebagai konsumen produk kapitalis dibanding laki-laki. *Kedua* perempuan lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan pola konsumsi. *Ketiga* perempuan telah dikonstruksi oleh sosial budaya sebagai manusia yang lembut, penyayang dan sebagainya. Stereotype ini kemudian dengan sendirinya memposisikan perempuan pada posisi yang lemah, penurut dan tidak etis untuk melakukan protes, apalagi menggugat struktur sosial budaya yang telah mapan. *Keempat* rata-rata perempuan lebih pintar menggaet konsumen, terutama konsumen laki-laki.

Isu gender yang senyatanya dimaksudkan untuk membebaskan perempuan dari posisi subordinansi dan kesewenang-wenangan menuju kesetaraan dan egalitarianisme, justru direduksi kapitalisme dalam lalu lintas perekonomian pasar bebas yang kami sebut sebagai gaya baru peng eksploitasian perempuan. Kapitalisme melalui pasar semakin memperkokoh keberadaannya di tengah arus globalisasi yang semakin tak terbendung. Melalui media masa bernama iklan, kapitalisme telah mentransformasikan dan merubah *consumer culture* masyarakat serta membentuk gaya hidup baru. Meskipun belakngan gerakan feminisme telah berhasil membebaskan perempuan dari stereotype peran domestik ke domain publik dengan mendorong mereka bekerja di hampir seluruh sektor publik, seperti di pabrik, pertambangan, juru tulis, manager, politikus dan pekerjaan lainnya yang dinilai bukanlah pekerjaan perempuan, namun bukan berarti perempuan telah sepenuhnya terbebas dari ketertindasan dan pengeksplorasian. Karena terbebasnya perempuan dari sektor domestik dan masuknya mereka pada sektor publik justru menimbulkan persoalan baru terhadap eksistensi mereka sebagai perempuan. Dengan bekerja di sektor publik, perempuan justru semakin terbebani dengan adanya peran ganda yang harus disandangnya.

Seiring dengan itu kekuatan kapitalisme melalui ekonomi global telah menciptakan begitu banyak perangkap yang setiap saat siap menjaring apa dan siapa saja menjadi komoditi yang kemudian melahirkan pensubordinasian dan pengeksplorasian dalam modus yang lebih hegemonik. Dan apa yang disaksikan di panggung modernitas dewasa ini adalah kapitalisme lewat dunia periklanan yang semakin memperkokoh dan mendapatkan bentuknya dalam meng-

eksploitasi perempuan. Budiasa memperkirakan bahwa rata-rata hampir 90% dunia periklanan menjadikan wanita sebagai model iklan.³⁴ Priosedarsono bahkan mengatakan bahwa tampilnya wanita dalam iklan memang dibutuhkan untuk memperkuat daya jual dari sebuah produk, bukan saja dalam menyampaikan sebuah pesan tetapi juga kesan terhadap produk tersebut.³⁵

Tubuh perempuan misalnya, telah direduksi menjadi piranti untuk dijadikan komoditi, seperti mobil, minuman, barang-barang olah raga dalam upaya memberikan daya tarik pada suatu produk. Daya pikat erotik merupakan faktor dominan dan sangat penting dalam membangkitkan hasrat orang untuk mengkonsumsi suatu produk. Karena perempuan ditakdirkan menjadi indah dan memesona, maka kapitalis dengan cerdas menggunakan perempuan untuk mengembangkan usaha mereka.³⁶ Wanita dan dunia bisnis kini menjadi dua hal yang sulit dipisahkan. Hampir bisa dipastikan di setiap sektor bisnis, terutama dunia hiburan seperti film, sinetron, televisi, radio, iklan dan perdagangan selalu melibatkan wanita di dalamnya. Selain itu, kaum kapitalis memegang posisi kunci dalam setiap bisnis yang banyak melibatkan kaum wanita tersebut

Pasar yang mengambil bentuknya melalui iklan di satu sisi telah memberikan peluang bagi perempuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan potensi dirinya dalam berbagai dimensi kehidupan. Perempuan telah mampu melakukan suatu transformasi sosial dari peran domestik yang diasosiasikan sebagai pekerjaan tidak bernilai ekonomis dan masyarakat *second class* menjadi perempuan yang lebih mandiri dan penuh kebebasan. Namun demikian dunia iklan sendiri bukanlah wadah yang netral dari kepentingan, malah sebaliknya iklan sangat sarat dengan kepentingan kapitalis. Irwan Abdullah menyatakan bahwa dalam dunia periklanan, kapitalisme sebagai suatu sistem telah membentuk sedemikian rupa struktur-struktur yang kokoh, baik perempuan maupun laki-laki sebagai subjek tidak memiliki kekuatan.³⁷ Kepentingan pasarlah yang menjadi ideologi dalam keseluruhan proses produksi di mana

³⁴Delmira Syafrini, "Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Media," *Humanus* 13, no. 1 (2014): 20–27, <https://doi.org/10.24036/jh.v13i1.4093>.

³⁵Ojo Kurniadi, "Perempuan dalam Tayangan Iklan di Televisi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 8, no. 1 (2007): 103–12, <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i1.1230>.

³⁶Syamsudin Syamsudin, "Eksploitasi Wanita dalam Perspektif Kapitalis," *E-jurnal Egalita* 1, no. 2 (2006): 20–40, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1923>.

³⁷Abdullah, *Sangkan Paran Gender*.

setiap orang harus tunduk di bawah kepentingan pasar. Oleh karenanya dapat dipahami mengapa dunia iklan mencitrakan dan mengarakterisasikan perempuan yang ideal adalah yang berkulit putih dan mulus, tubuh yang seksi dan sensual.³⁸ Melalui logika-logika yang demikian akhirnya membentuk realitas objektif perempuan untuk mencirikan mereka seperti figur yang didambakan. Dari situlah, produk-produk kapitalisme seperti pemutih wajah dan alat kosmetika lainnya menjadi kebutuhan yang diciptakan oleh struktur kapitalisme.³⁹ Lebih dari itu, tubuh dalam gelombang arus konsumerisme merupakan instrumen penting dalam seleksi sosial dan sekaligus faktor dominan di dalam berbagai pertukaran sosial. Standar ukuran menarik tidaknya seseorang dan penerimaan sosial serta batas-batas hubungan sosial sangat dipengaruhi oleh bentuk tubuh.

Tubuh yang semula sangat pribadi dan pemiliknya mempunyai kebebasan mutlak untuk mengelolanya, kini menjadi publik karena masuknya kapitalisme ke ranah “privat”. Saat bersamaan, kebebasan perempuan terpenjara dalam barak-barak kontrol sosial. Kehadiran kapitalisme menurut Felix Guattari selalu berusaha membangun dan menciptakan model-model hasrat karena keberlangsungannya sangat bergantung pada keberhasilannya menanamkan model-model ini pada massa yang dieksploitasinya.⁴⁰ Ironisnya, perempuan yang berada dalam alam citraan yang absurd merasa berada dalam dunia yang empirik dan real, bahkan mereka lebih merasa menemukan eksistensinya dalam kondisi seperti itu. Hal ini dapat dimafhumi karena tubuh adalah asset dan sumber daya yang tinggi nilai ekonomisnya dalam sistem kapitalisme. Lewat tubuh, perempuan punya basis *bargaining position* yang tinggi terhadap kekuasaan. Bagi perempuan dalam gelombang ekstetisasi, tubuh merupakan asset ekonomi yang punya nilai jual. Semakin indah dan seksi tubuh seseorang, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Oleh karena itu, merawat dan memperindah tubuh adalah suatu aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah dan mempertinggi nilai jual. Artinya semakin indah dan ideal suatu bentuk tubuh, maka semakin tinggi nilai tawar dan nilai tukar sosial dan ekonomi yang diperoleh.

³⁸Inda Fitriyarni, “Iklan dan Budaya Populer: Pembentukan Identitas Ideologis Kecantikan Perempuan oleh Iklan di Televisi,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2009): 119–35, <https://doi.org/10.24002/jikv6i2.199>.

³⁹Rina Wahyu Winarni, “Representasi Kecantikan Perempuan dalam Iklan,” *Deiksis* 2, no. 2 (2010): 134–52, <https://doi.org/10.30998/DEIKSIS.V2I02.399>.

⁴⁰Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat*.

Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa kini tubuh telah bergeser fungsi; dari fungsi biologis dan reproduksi menjadi fungsi ekonomi politik, khususnya fungsi 'tanda'. Ekonomi kapitalis telah merubah penggunaan tubuh dan hasrat sebagai titik sentral komoditas yang disebut dengan 'ekonomi libido'. Tubuh menjadi bagian dari komoditi kapitalisme yang memperjualbelikan tanda, makna dan hasratnya.⁴¹ Selain itu tubuh perempuan juga kerap digunakan sebagai objek pemuasan nafsu laki-laki dan ditampilkan sebagai pengukuhan nilai-nilai ideal tubuh perempuan. Produsen dan kapitalisme mengungus daya tarik seksual dengan penekanan pada bagian-bagian sensual perempuan, seperti payudara, paha, ataupun tubuh sensual yang utuh. Keadaan ini memposisikan tubuh perempuan sebagai objek pemuas hasrat laki-laki untuk tujuan komersil.⁴²

Apa yang terjadi kemudian adalah bergentayangnya pusat-pusat kebugaran *-fitness centre-* di tengah belantara modernitas. Pusat-pusat kebugaraan menjadi agen yang mendapat legalisasi dari konstruksi sosial untuk menegaskan ukuran-ukuran tubuh yang ideal. Secara umum dapat dilihat bahwa masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap perawatan kesehatan, pembentukan dan penampilan tubuh. Pengelolaan tubuh menjadi sedemikian *urai*, mulai dari perawatan rambut, alis, mata, bulu mata, hidung, bibir, mulut, kulit, kuku, lengan, perut, buah dada, pinggul, betis, kaki, bahkan sampai pada bulu kaki. Gejala ini menarik untuk dicermati, terutama yang berhubungan dengan bagaimana kapitalisme telah memperdaya dan menempatkan perempuan dalam tendensi *estetisasi* tubuh tersebut. Eksploitasi tubuh ini lebih jauh berubah menjadi komoditi ekonomis, dimana keterkaitan antara seksualitas dengan sisi ekonomi ini tampak dalam kegiatan produksi, distribusi dan transaksi hasrat. Sistem ekonomi seperti ini pada gilirannya menjelma menjadi *libidonomics*, yakni sebuah sistem pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan dan kegairahan dalam masyarakat.⁴³

⁴¹Alex Sobur, *Analisis Teks dan Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

⁴²Yanti Dwi Astuti, "Media dan Gender (Studi Deskriptif Representasi Stereotipe Perempuan dalam Iklan di Televisi Swasta)," *Profetik Jurnal Komunikasi* 09, no. 2 (2016): 25-32, <https://doi.org/10.14421/pjkc.v9i2.1205>.

⁴³Supartiningsih Supartiningsih, "Peran Ganda Perempuan: Sebuah Analisis Filosofis Kritis," *Jurnal Filsafat* 33, no. 1 (2003): 42-54, <https://doi.org/10.22146/jf.31272>.

Persoalannya kemudian adalah, apakah perempuan lebih menjadi terhormat seiring dengan bertambah cantiknya mereka, atau justru mempertegas cara pengelolaan kekuasaan yang lebih canggih dalam mensubordinasi dan mengeksploitasi mereka? Bagaimanapun, pengendalian dan pengelolaan tubuh sangat erat kaitannya dengan standar nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Menarik untuk disimak apa yang dilontarkan oleh Randall Collins bahwa perempuan bukan lagi merupakan bagian yang *private* dari kehidupannya sendiri, karena campur tangan orang luar yang sudah sedemikian kuat.⁴⁴ Hal ini berkaitan dengan empat persoalan penting, *pertama* ukuran-ukuran dalam pengaturan tubuh sangat ditentukan oleh konteks sosial, terutama sangat tergantung pada penilaian yang diberikan oleh laki-laki. *Kedua*, kapitalisme telah ikut terlibat terlalu jauh dan sangat menentukan cara-cara pengelolaan tubuh dan kecantikan sehingga perempuan menjadi alat kapitalisme dalam distribusi produk dan menjadi sasaran pasar yang sangat potensial. *Ketiga*, kecenderungan dalam pengelolaan tubuh memperlihatkan perempuan semakin terlibat dalam proses estetisasi kehidupan yang menyebabkan tidak hanya terjadinya pembentukan etos konsumtif dalam kehidupan perempuan, tetapi juga membentuk dirinya sebagai komoditi yang dapat dikonsumsi dan dinikmati. *Keempat*, kecenderungan semacam ini juga menunjukkan bahwa perempuan telah mentransformasikan kelas menjadi status yang mengarah kepada pembentukan citra kehadiran seseorang secara sosial.

Proses ini sesungguhnya yang menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi, dimana tubuh perempuan –misalnya menonjolkan bagian tertentu yang dicitrakan sesuai dengan keinginan produk yang dipasarkan- dijadikan alat memproduksi suatu produk. Dan di sisi lain, perempuan dijadikan objek pasar produk kapitalisme, dimana perempuan menjadi konsumen utama minimal menjadi saluran masuknya barang dan *life style*. Dengan kata lain, perempuan dalam proses ini telah tersegmentasi sedemikian rupa di dalam *life style*-nya sendiri. Implikasinya, perempuan semakin terpisahkan dengan perempuan lain. Dan yang terjadi kemudian adalah perempuan yang seharusnya membebaskan diri dari subordinasi laki-laki, justru sebaliknya, mensubordinasikan perempuan lain dan dirinya sendiri ke dalam struktur-struktur yang didominasi oleh laki-laki dan berbagai institusi sosial seperti keluarga, pasar, negara dan media masa.

⁴⁴Abdullah, *Sangkan Paran Gender*.

Dari persepektif ini, isu gender sesungguhnya mengalami distorsi makna dan kehilangan korelasinya dalam membebaskan perempuan dari penjara diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Justru yang terjadi sebaliknya isu gender telah membuat penjara baru bagi perempuan dalam bentuk peng-eksploitasian dengan performen yang seolah-olah bersahabat dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, padahal sebaliknya menyimpan kekejaman yang luar biasa. Hal ini akibat proses ideologisasi terhadap simbol-simbol globalisasi, perdagangan bebas dan isu gender yang kemudian direduksi oleh kapitalisme dalam menciptakan profit sebanyak mungkin melalui mekanisme pasar untuk kelangsungan eksistensinya.

D. Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme

Gagalnya pengembangan SDM melalui WID dan PKK, dan megguritanya kapitalisme sebagai bentuk baru penindasana perempuan menghendaki strategi alternatif yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial untuk mem-formulasikan gagasan pemberdayaan perempuan dalam percaturan global. Karena seperti yang telah diuraikan di bagian awal, kontribusi perempuan amat besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, sementara posisi mereka masih tetap tersubordiansi dan termarginalkan. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan seyogyanya menciptakan ruang gerak yang cukup dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan potensi dirinya dalam setiap proses pembangunan. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih konperhensif dalam pe-ngembangan sumber daya manusia yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, penulis manawarkan pendekatan transformasi gender dan pemberdayaan perempuan sebagai strategi pembebasan per-empuan dari jerat pembangunanisme dan kapitalisme.

Istilah pemberdayaan, secara teoritis, merupakan anti-tesa terhadap konsepsi pembangunan.⁴⁵ Pemberdayaan perempuan menghendaki keterlibat-an yang bersifat partisipatif (*buttom up*) dan menempatkan perempuan sebagai

⁴⁵Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community development: Alternatif Pengembangan masyarakat di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008); Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

aktor utama dalam menentukan arah kebaikan taraf hidup. Perempuan bebas menentukan arah pilihan tanpa dibatasi oleh struktur apapun sebagaimana laki-laki baik di ranah domestik maupun publik. Konsepsi pemberdayaan menghendaki *self esteem (to be a person)* dan *freedom from servitude (to be able to choose)* dengan mengakui segala potensi yang dimiliki perempuan sebagai manusia. Dalam istilah lain, sebagaimana diketengahkan Julia Kristeva, “perempuan harus menulis tentang dirinya sendiri”, menolak matra ketidakadilan, dan perempuan mesti sebagai pencipta narasi. Narasi tentang gender tidak selalu tentang kontrol patriarki melainkan sebuah perjuangan atas bahasa yang mencipta kategorisasi dan penamaan yang tidak mengembalikan perempuan ke dalam penjara yang sama. Konsepsi ini tampak melampaui gagasan sekedar melihat perempuan sebagai “yang tak berdaya” sebagaimana gagasan yang dibangun selama ini, melainkan memasuki arena bahasa dan politik konsep yang dikonstruksi secara sosial.

Konsep transformasi gender sebagai wahana pemberdayaan perempuan, mengandaikan tiga hal utama. *Pertama*, mereformasi institusi untuk menetapkan hak-hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. *Kedua*, peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk memantapkan insentif demi kesetaraan sumber daya dan partisipasi. *Ketiga*, mengambil langkah kebijakan proaktif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam penguasaan sumber daya dan partisipasi politik.⁴⁶

Mereformasi institusi bertujuan untuk menjamin kesetaraan dalam hak-hak dasar. Hakikat hukum, sosial, dan ekonomi menyediakan ruang yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara produktif, dapat menggapai dasar kualitas hidup, dan dapat mengambil keuntungan atas berbagai kesempatan baru yang ditawarkan oleh pembangunan melalui konsepsi pemberdayaan. Prinsip pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai dasar dalam meningkatkan kesetaraan gender yang tertuang dalam bentuk hak, akses terhadap sumber daya produktif, dan serta partisipasi politik. Hal ini penting menjadi kerangka kebijakan sosial yang dengannya diskriminasi dari berbagai aspek terutama di ruang tenaga kerja dapat diberantas. Langkah kebijakan proaktif menjadi basis tindakan bertahap dan bersifat konkret dalam mengatasi diskriminasi gender, baik di rumah tangga, masyarakat, maupun di tempat kerja.

⁴⁶World Bank, “Pembangunan Berperspektif Gender; Melalui Kesetaraan Gender dalam Hak, Sumber Daya, dan Kebebasan Berpendapat,” 2000, <http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/indonesiansumm.pdf>; Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development* (New York: Pearson, 2015).

Oleh karena kombinasi antara reformasi institusional dan pemberdayaan ekonomi kerap berdampak secara perlahan dan adaptif, kebijakan proaktif dapat berdayaguna dalam mengonsentrasikan sub-populasi tertentu di masyarakat; sebagai misal pada kaum miskin yang masih mengalami ketidaksetaraan gender dan hal senada lainnya.

Konsepsi transformasi gender mengandaikan wacana baru sebagai “jalan ketiga” yang tidak lagi berkuat mempersoalkan masalah *sex* atau jenis kelamin. *Sex* merupakan kenyataan alamiah yang tidak dapat ditolak sebagai kodrat. Mempersoalkannya, sebagaimana gelombang feminisme generasi kedua, dengan cara mencipta jurang pemisah secara radikal antara “perempuan sebagai lawan dari laki-laki dalam struktur biologis”, antara feminitas (yang bersifat perempuan) dan maskulinitas (yang bersifat laki-laki), akan menjadikan wacana gender menjadi begitu simplifikatif. Begitu juga dengan gagasan generasi pertama yang terpatri pada “kesetaraan universal” antara laki-laki dan perempuan. Secara filosofis, mengandaikan “kesetaraan universal” hanya akan mereduksi dan melenyapkan suatu fakta mengenai perbedaan tentang tubuh. Atau juga “menguniversalkan masalah perempuan (sebagaimana upaya dalam generasi awal) akan menjadikan kenyataan perempuan sebagai yang absurd.

Transformasi gender mempostulasikan, “kita” (laki-laki dan perempuan) sebagai manusia yang tidak sendirian. Manusia senantiasa ada dalam kontrak sosial dan serta berbaur dalam komunitas-komunitas tertentu. Begitu juga dengan perempuan, perempuan senantiasa ada dalam konstalasi peradaban, struktur psikis, dan kultur yang berbeda satu sama lain. Membebaskan perempuan tidak berarti ia harus dimaknai sebagai yang selalu kontra dengan laki-laki atau setara secara universal, tidak juga “menunggalkan” identitas, melainkan harus ada dalam kekhasannya masing-masing dan ada dalam unsur ketidakterpaksaan. Beberapa teoritikus kontemporer seperti Julia Kristeva, Michel Foucault, dan Jacques Lacan, dapat disebut sebagai tokoh yang telah dengan giat membuka wacana baru tentang konsep ketertindasan perempuan dengan tidak mereduksi identitas laki-laki dan perempuan. Kristeva lebih menghendaki kajian bagaimana mengembalikan fungsi-fungsi maternal atau keibuan bagi perempuan sebagai jalan pembebasan perempuan.⁴⁷

Perkembangan transformasi gender sebagai strategi pemberdayaan perempuan sudah berlangsung sejak tahun 1990-an sebagai perluasan terhadap

⁴⁷Christina Siwi Handayani et al., *Subyek yang Dikekang; Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jacques Lacan* (Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos, 2013).

agenda pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan. Pengarusutamaan gender diposisikan sebagai jalur kembar yang mengombinasikan dua komponen dalam proses pembangunan. Pertama integrasi perhatian terhadap laki-laki dan perempuan dalam seluruh proses pembangunan ke dalam semua kebijakan dan proyek dengan hasil yang diharapkan adalah kesetaraan. Kedua, kegiatan khusus yang bertujuan memberdayakan perempuan dengan hasil yang diharapkan adalah keberdayaan perempuan.⁴⁸ Transformasi gender mengacu pada perubahan yang mengatasi ketidaksetaraan gender melalui peningkatan posisi perempuan dalam masyarakat yang berhubungan dengan kontribusinya dalam pengembangan masyarakat yang damai dan demokratis⁴⁹.

Lebih lanjut, Moser menawarkan dua elemen kerangka kerja dalam dalam transformasi gender. Elemen pertama adalah membedakan dengan tegas antara “transformasi” dengan “pemberdayaan” dalam konteks gender. Transformasi gender mengacu pada tindakan yang secara inheren bersifat politis dan berkaitan dengan perubahan struktural dalam relasi kuasa gender. Dengan demikian, ia menekankan aksi kolektif, kontestasi, dan negosiasi. Pemberdayaan perempuan mengacu pada pengarusutamaan gender yang mengacu pada bagaimana perempuan secara individu meningkatkan daya tawar mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi dan politik. Elemen kedua adalah elaborasi dari suatu kerangka kerja yang secara khusus menangani transformasi gender.⁵⁰

Transformasi sosial dalam menciptakan suatu keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yang berkeadilan membutuhkan agenda pengintegrasian antara transformasi dan pemberdayaan dengan pendekatan gender dengan menekankan pada sistem, struktur dan kultur yang menyebabkan terjadinya segala bentuk penindasan.⁵¹ Karena pemberdayaan tidak akan dapat diwujudkan apabila tidak ada proses liberalisasi terhadap suatu sistem yang melahirkan ketidakadilan dan penindasan. Artinya, agenda transformasi gender akan

⁴⁸Caroline O. N. Moser, “Gender Transformation in A New Global Urban Agenda: Challenges for Habitat III and Beyond,” *Environment and Urbanization* 29, no. 1 (2017): 221–36, <https://doi.org/10.1177/0956247816662573>.

⁴⁹Robert Morrell, “Men, Movements, and Gender Transformation in South Africa,” *The Journal of Men’s Studies* 10, no. 3 (2002): 309–27, <https://doi.org/10.3149/jms.1003.309>.

⁵⁰Moser, “Gender Transformation in A New Global Urban Agenda: Challenges for Habitat III and Beyond.”

⁵¹Irwan Abdullah, “Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial,” *Humaniora* 15, no. 3 (2003): 265–75, <https://doi.org/10.22146/jh.794>.

mempertanyakan keabsahan setiap struktur dan kultur yang ada dalam suatu masyarakat dan negara. Karena sebagaimana dapat dilihat bahwa ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender terutama bagi perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan sistem dan struktur di mana baik laki-laki, maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.⁵² Ketidakadilan gender sesungguhnya telah banyak melahirkan bermacam ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja.

Selain itu, pendekatan *developmentalism* dan WID yang menawarkan pengintegrasian perempuan ke dalam proses pembangunan dinilai gagal karena tidak dapat sepenuhnya memberikan pilihan dan ruang gerak yang bebas pada perempuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas dirinya, apalagi membebaskan mereka dari dominasi dan pengeksploitasian dari suatu sistem kekuasaan. Maka pendekatan analisis gender yang berarti adanya transformasi gender memungkinkan perempuan diberdayakan dan mendapat perlakuan yang setara dengan laki-laki. Karena transformasi gender (model ini dalam istilah makronya dikenal dengan GAD (*Gender and Development*) tidak hanya memandang perlu melibatkan perempuan dalam pembangunan, tetapi lebih jauh melihat perempuan sebagai sumber insani pembangunan dan agen perubahan dari perubahan sosial, bukan sekedar penerima bantuan pembangunan yang pasif dan inferior.

Melalui pemberdayaan, perempuan dijadikan sebagai subjek dari kebijakan dan perencanaan program apa yang relevan untuk diterapkan, serta mengevaluasi bersama program-program tentang mereka. Model ini, memanimalisir intervensi pemerintah dalam menentukan model dan kebijakan apa yang relevan bagi perempuan sesuai dengan prinsip pemberdayaan.⁵³ Oleh karenanya, negara harus berpartisipasi dalam menunjang emansipasi perempuan, dan negara diharapkan memiliki tugas untuk memfasilitasi terciptanya suatu ruang dan jasa sosial yang selama ini diusahakan dan disediakan oleh perempuan secara individu seperti perawatan dan kesehatan anak.

⁵²Morrell, "Men, Movements, and Gender Transformation in South Africa."

⁵³Firdaus Firdaus, "Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, NTT," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 5, no. 1 (2016): 13–22, <https://doi.org/10.22202/mamangan.1926>.

Dalam konteks ini, transformasi gender sesungguhnya adalah upaya pembebasan perempuan dari segala bentuk penindasan baik secara struktur, personal, kelas, warna kulit sampai pada ekonomi internasional yang cenderung kapitalistik.⁵⁴ Artinya pendekatan ini dapat diharapkan memperbaiki keterpurukan nasib perempuan dengan mengakui dan menerima betapa pentingnya analisis kelas, ras, gender dan pembangunan sebagai masalah yang harus menjadi pusat perhatian.

Upaya yang harus dilakukan dalam memberdayakan perempuan adalah; *pertama*, mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan baik dalam program berbagai organisasi maupun dalam lembaga pendidikan. Semua usaha dikerahkan agar tercipta kebijakan manajemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif gender. Artinya upaya-upaya penanganan masalah pengembangan sumber daya perempuan haruslah diarahkan dan dikembangkan secara struktural dan sistemik. *Kedua*, adalah perlu dipikirkan tentang advokasi, dimana sangat dibutuhkan pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat. Hal ini menurut Mansour Fakih, akar persoalannya terletak pada, *pertama*, substansi hukum seperti perundang-undangan negara, tafsir agama ataupun hukum adat, maka strategi yang harus diterapkan adalah melakukan advokasi untuk mendesakkan alternatif hukum yang berprespektif keadilan gender. *Kedua*, masalah kultur hukum, di mana kultur masyarakat dalam menaati hukum. Upaya yang dilakukan adalah kampanye dan pendidikan massa. *Ketiga*, aparat pelaksana hukum atau struktur hukum, maka upaya yang dilakukan adalah kampanye pendidikan dan penyadaran aparat hukum tentang masalah ketidakadilan gender.⁵⁵

Dapat dikatakan perspektif gender melalui transformasi gender merupakan proses memberdayakan perempuan untuk menciptakan relasi antar sesama manusia yang secara fitrah dan fundamental baru, lebih baik, dan lebih adil. Oleh karenanya, hubungan struktur yakni hubungan ekonomi yang eksploitatif mesti dirubah menuju struktur yang *equity* tanpa eksploitasi. Hubungan kultur hegomonik perlu dirubah menjadi struktur politik yang non-represif dan hubungan struktur gender yang mendominasi perempuan dirubah menuju struktur yang membebaskan.

⁵⁴Laurence Bachmann, "Female Friendship and Gender Transformation," *European Journal of Women's Studies* 21, no. 2 (2014): 165–79, <https://doi.org/10.1177/1350506813515856>.

⁵⁵Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 163-4.

Ini berarti proses demokratisasi menjadi suatu keniscayaan dan *keyword* bagi terwujudnya pemberdayaan perempuan. Sebab, demokrasi sesungguhnya merupakan suatu jalan dan proses yang memungkinkan terciptanya ruang gerak, kesempatan, wewenang dan memungkinkan rakyat, khususnya perempuan mengelola dirinya sendiri dengan prinsip persamaan dan keadilan dengan tidak mempersoalkan lagi apakah perempuan berada dalam wilayah domestik atau publik. Proses demokrasi ini tentunya diawali dari tingkat keluarga di mana perempuan secara bersama-sama dengan laki-laki berurung-rembuk membicarakan apa yang terbaik untuk mereka. Karena jika dipaksakan secara terus menerus, perempuan harus keluar dari domain domestik dan harus berkiprah di dunia publik, ini artinya menjadikan mereka semakin tak berdaya karena adanya peran ganda yang harus dipikul (mengurus pekerjaan di dunia publik dan harus mengurus suami dan anak-anak dalam rumah tangga). Hal ini tentunya semakin mempersulit posisi mereka untuk benar-benar menikmati arti sebuah kebebasan. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana perempuan tidak mengalami marginalisasi, subordinasi, dan pengeksploitasian serta adanya pengakuan struktural dan kultural yang memberi peluang bahwa mereka mempunyai hak dan dapat mempergunakan semua fasilitas yang ada sebagaimana halnya dengan kaum laki-laki.

E. Kesimpulan

Perubahan paradigma pembangunan dari *production centered development* ke arah *people centred development*, belum mampu merubah kondisi keterpurukan perempuan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Ada dua hal yang menjadi masalah dasar dalam menciptakan keberdayaan pada perempuan. Pertama, kebijakan pengembangan sumber daya manusia belum berorientasi pada dimensi pemberdayaan. Kedua, tekanan struktur dan ekspansi ekonomi kapitalis yang begitu kuat dan massif telah menempatkan perempuan pada posisi semakin tidak berdaya. Oleh karenanya beberapa hal yang diperlukan dalam proses pembebasan perempuan dari ketitidakadilan gender adalah, *pertama*, kebijakan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada logika *production centered development* perlu didekonstruksi dan diorientasikan pada *human centered development*. *Kedua* kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang menempatkan manusia sebagai *resources* pembangunan, dimana nilai dan harga

manusia ditentukan oleh sejauhmana kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan sistem produksi, juga perlu didekonstruksi dan diarahkan pada *human centered development* yang menempatkan manusia sebagai subjek yang menentukan arah dan corak pembangunan.

Ketiga, seiring dengan bergesernya paradigma pembangunan dari *production centered development* menuju *people centered development*, maka kebijakan pengembangan sumber daya manusia pun harus betul-betul menyentuh aspek pemberdayaan perempuan. Hal ini sangat dimungkinkan melalui pendekatan dengan menggunakan perspektif gender. *Keempat*, isu gender dan gerakan transformasi gender seharusnya diarahkan pada perlawanan terhadap sistem, struktur dan kultur yang tidak adil, sehingga memungkinkan terjadinya transformasi sosial yang dapat menghapuskan dan menyingkirkan segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi dan diskriminasi yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya upaya pembebasan perempuan dari ketertindasan bukan sepenuhnya dihadapkan pada laki-laki, akan tetapi perempuan dan laki-laki secara bersama-sama melakukan perlawanan kepada kekuatan sistem yang mendominasi.

Isu perlawanan terhadap dominasi laki-laki secara biologis sudah tidak relevan lagi dalam pembebasan perempuan, namun sebaliknya perempuan bersama-sama dengan laki-laki seharusnya menyatukan kekuatan untuk melawan dominasi sebuah sistem raksasa yang cukup kuat menindas dan mengeksploitasi apa dan siapa saja, yaitu kapitalisme. Karena bagaimanapun, kelihatannya laki-laki seolah-olah diuntungkan, namun sesungguhnya laki-laki pun telah dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk bersama-sama mengabadikan struktur hubungan gender yang timpang. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama tersubordinasi dalam dunia kapitalisme. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami nasib yang sama dalam hal tersubordinasi. Hanya saja perempuan merupakan komoditi yang memiliki peluang besar untuk lalu lintas distribusi barang, karena adanya struktur berpikir dan tata nilai masyarakat yang melihat perempuan sebagai objek.

Keseimbangan antara laki-laki dan perempuan akan dapat terwujud sebagaimana mestinya apabila terjadi suatu proses demokratisasi yang memberikan ruang gerak, wewenang terhadap perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dan memikirkan apa yang terbaik dalam menentukan

nasib dan masa depan mereka. Dan dalam konteks ini, pemerintah harus mengurangi intervensinya terhadap rakyat dan secara bersama-sama –pemerintah dan rakyat– melakukan perubahan-perubahan yang memungkinkan terjadi proses demokrasi. Akhirnya melalui ini semua, dengan penuh kesadaran, pemberdayaan perempuan akan dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan.[s]

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. "Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial." *Humaniora* 15, no. 3 (2003): 265–75. <https://doi.org/10.22146/jh.794>.
- . *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Anggaunitakiranantika, Anggaunitakiranantika. "Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 45–66. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216>.
- Ariesta, Ira. "Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 2 (2014): 41–51. <https://doi.org/10.22202/mamangan.97>.
- Astuti, Yanti Dwi. "Media dan Gender (Studi Deskriptif Representasi Stereotype Perempuan dalam Iklan di Televisi Swasta)." *Profetik Jurnal Komunikasi* 09, no. 2 (2016): 25–32. <https://doi.org/10.14421/pjk.v9i2.1205>.
- Bachmann, Laurence. "Female Friendship and Gender Transformation." *European Journal of Women's Studies* 21, no. 2 (2014): 165–79. <https://doi.org/10.1177/1350506813515856>.
- Bernet, Richard, dan Jand Rond Muller. *Global Reach, The Power Multinational Corporation*. New York: Simon and Scuster Rockefeller Center, 1974.
- Dewi, Elisabeth. "Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 9, no. 1 (2013): 1–6.
- Djoeffan, Sri Hidayati. "Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17, no. 3 (2001): 284–300. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v17i3.49>.
- Fagertun, Anette. "Labour in Paradise: Gender, Class and Social Mobility in the Informal Tourism Economy of Urban Bali, Indonesia." *The Journal of Develop-*

- ment Studies* 53, no. 3 (2017): 331–45. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1184248>.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Firdaus, Firdaus. "Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, NTT." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 5, no. 1 (2016): 13–22. <https://doi.org/10.22202/mamangan.1926>.
- . "Parade Iklan Politik di Tahun Politik: Polarisasi Penggunaan Iklan Politik Untuk Membangun Citra Menuju Pemilu 2014." *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 1 (2013): 81–94. <https://doi.org/10.15548/turast.v1i1.475>.
- Fitryarini, Inda. "Iklan dan Budaya Populer: Pembentukan Identitas Ideologis Kecantikan Perempuan oleh Iklan di Televisi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2009): 119–35. <https://doi.org/10.24002/jik.v6i2.199>.
- Gitosaputro, Sumaryo, dan Kordiyana K. Rangga. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Handayani, Christina Siwi, Gadis Arivia, Haryatmoko Haryatmoko, dan Robertus Robet. *Subyek yang Dikekang; Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jacques Lacan*. Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos, 2013.
- Ibrahim, Idi Subandy. *Acstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. Bandung: Mizan, 1997.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. *Community development: Alternatif Pengembangan masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jendrius. "Ayam Batino Lah Bakukuak: Otonomi Daerah dan Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat." *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 1, no. 2 (2011): 121–36. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.73>.
- Khotimah, Khusnul. "Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan." *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 4, no. 1 (2009): 158–80.
- Kurniadi, Ojo. "Perempuan dalam Tayangan Iklan di Televisi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 8, no. 1 (2007): 103–12. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i1.1230>.

- Lestari, Nur Afta. "Eksplotasi pada Perempuan Sales Promotion Girls." *Komunitas: International Journal of Indonesian and Culture* 4, no. 2 (2012): 139–47. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2402>.
- Liddle, R. William. "The Relative Autonomy of the Third World Politician: Soeharto and Indonesian Economic Development in Comparative Perspective." *International Studies Quarterly* 35, no. 4 (1991): 403–27. <https://doi.org/10.2307/2600948>.
- Lotulung, Leviane Jackelin Hera, dan Deddy Mulyana. "Perempuan dan Politik di Sulawesi Utara." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 20, no. 2 (2018): 138–44.
- Morrell, Robert. "Men, Movements, and Gender Transformation in South Africa." *The Journal of Men's Studies* 10, no. 3 (2002): 309–27. <https://doi.org/10.3149/jms.1003.309>.
- Moser, Caroline O. N. "Gender Transformation in A New Global Urban Agenda: Challenges for Habitat III and Beyond." *Environment and Urbanization* 29, no. 1 (2017): 221–36. <https://doi.org/10.1177/0956247816662573>.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam." *Jurnal Al-ulum* 13, no. 2 (2013): 491–512.
- Nugroho, H. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Patnani, Miwa. "Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan." *Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi* 3, no. 2 (1999): 57–60. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v0i0.4603>.
- Permadi, Aad Satria. "Menjadi Pelacur: Studi Fenomenologis tentang Proses Terbentuknya Motif Melacur pada Warga Desa X." dalam *Seminar Nasional "Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal,"* 1–8. Surakarta, 2015.
- Piliang, Yasraf Amir. *Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milinium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Bandung: Mizan, 1998.
- Priyatno, Ardi. "Penyiksaan TKI di Malaysia, Kisah Suram yang Seolah Tiada Akhir." Diedit oleh Ervan Hardoko. *internasional.kompas.com*. 13 Februari 2018.
- Rahmadani, Sri. "Bersiasat dengan Sumber Pendapatan; Analisis Struktur-Agensi Sumber Pendapatan Ganda Petani Miskin Sawah Nagari Batipuah Baruah, Kab.

- Tanah Datar." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 6, no. 1 (2017): 11–22. <https://doi.org/10.22202/mamangan.1170>.
- Rahmitha, Rahmitha, Hastuti Hastuti, Dyan Widyaningsih, Niken Kusumawardhani, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan M. Fajar Rakhmadi. "Poor Women ' s Livelihoods and Access to Public Services." Jakarta: Smeru Research Institute, 2016.
- Rashid, Hannah Aidinal Al. *Putih Cantik-Persepsi Kecantikan dan Obsesi Orang Indonesia Untuk Memiliki Kulit Putih*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks dan Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sohn, Kitae. "Gender Discrimination in Earnings in Indonesia: A Fuller Picture." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51, no. 1 (2015): 95–121. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016569>.
- . "The Height Premium in Indonesia." *Economics and Human Biology* 16 (2015): 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2013.12.011>.
- Supartiningsih, Supartiningsih. "Peran Ganda Perempuan: Sebuah Analisis Filosofis Kritis." *Jurnal Filsafat* 33, no. 1 (2003): 42–54. <https://doi.org/10.22146/jf.31272>.
- Suyanto, Bagong. "Nak Perempuan Yang Dilacurkan: Alasan Menjadi Pelacur dan Mekanisme Adaptasi." *Makara Hubs-Asia* 18, no. 1 (2014): 66–76. <https://doi.org/10.7454/mssh.v18i1.3462>.
- Syafrini, Delmira. "Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Media." *Humanus* 13, no. 1 (2014): 20–27. <https://doi.org/10.24036/jh.v13i1.4093>.
- Syamsudin, Syamsudin. "Eksploitasi Wanita dalam Perspektif Kapitalis." *E-jurnal Egalita* 1, no. 2 (2006): 20–40. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1923>.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Tjondronegoro, Sediono MP. "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa." *Majalah Prisma* 2, 1990.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. New York: Pearson, 2015.

- Welker, Marina. "The Green Revolution's ghost: Unruly subjects of participatory development in rural Indonesia." *American Ethnologist* 39, no. 2 (2012): 389–406. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2012.01371.x>.
- Wieringa, Saskia E. "Gender Harmony and the Happy Family: Islam, Gender and Sexuality in post-Reformasi Indonesia." *South East Asia Research* 23, no. 1 (2015): 27–44. <https://doi.org/10.5367/sear.2015.0244>.
- Winarni, Rina Wahyu. "Representasi Kecantikan Perempuan dalam Iklan." *Deiksis* 2, no. 2 (2010): 134–52. <https://doi.org/10.30998/DEIKSIS.V2I02.399>.
- Winarto, Yunita T. "State Intervention and Farmer Creativity: Integrated Pest Management among Rice Farmers in Subang, West Java." *Agricultural and Human Values* 12, no. 4 (1995): 47–57. <https://doi.org/10.1007/BF02218566>.
- Wismayanti, Yanuar Farida. "Perdagangan Anak Perempuan yang Dilakukan: Potret Suram Kemiskinan dan Perlindungan Anak." In *Child Poverty and Social Protection Conference*, 1–23. Jakarta: Smeru Research Institute, 2013.
- . "Perempuan dalam Jaringan Perdagangan Anak yang Dilakukan di Kota Surabaya." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 17, no. 02 (2012): 117–33. <https://doi.org/10.33007/ska.v17i2.819>.
- World Bank. "Pembangunan Berperspektif Gender; Melalui Kesetaraan Gender dalam Hak, Sumber Daya, dan Kebebasan Berpendapat," 2000. <http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/indonesiansumm.pdf>.

This page intentionally left blank